UPAYA PEMULIHAN DAN PEMBERIAN GANTI RUGI TERHADAP KORBAN KEJAHATAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Fransiska Novita Eleanora
Fak. Hukum Univ. Mpu Tantular

ABSTRACT

One of the criminal victim's right is obtaining the compensation and curing their suffering as long as the criminal period. The objective of this paper is to discuss the compensation and restoration that deliver to the victim id not so complete due to some problems and constrains. This paper used normative methods. The result shows that it could be influenced by the law, the supporting facility and victim awareness itself, therefore the compensation does not not fulfil the justice for the victim criminal in accordance with his/her right.

PENDAHULUAN

Masalah kejahatan adalah masalah sosial yang sudah ada sejak dahulu kala, bahkan dapat dikatakan bahwa kejahatan muncul seiring dengan terciptanya kehidupan masyarakat manusia. Penegakan hukum pidana melalui sistem peradilan pidana saat ini bukan untuk melindungi korban tindak pidana pidana, melainkan untuk memulihkan tertib hukum yang telah dilanggar oleh pelaku tindak pidana. Kenyataan ini jelas menimbulkan ketidakadilan bagi korban tindak pidana, sebab perlindungan korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana pada hakekatnya merupakan salah satu bentuk perlindungan hak asasi manusia.

Oleh karena itu, masalah perlindungan korban tindak pidana termasuk salah satu masalah yang juga mendapat perhatian dunia internasional yang terwujud dalam Resolusi MU-PBB Nomor 40/34 tertanggal 29 November 1985 tentang "Deklarasi hak-hak korban dalam menuntut keadilan". Berdasarkan uraian di atas jelaslah, bahwa baik dilihat dari realitas sosial, maupun filosofis dan teoritis, perlindungan korban tindak pidana dalam arti pemulihan hak-hak korban yang telah dilanggar oleh pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia merupakan keharusan.

Sayang sekali sampai saat ini, korban kejahatan merupakan orang yang sekali terlupakan karena memang sampai saat ini baik dalam hukum pidana formil maupun materiil kurang memperhatikan kesejahteraan korban tindak pidana.

Salah satu bentuk sistim adalah satu kesatuan yang hakiki dan terbagi-bagi dalam bagian-bagian di mana setiap masalah atau persoalan menemukan suatu jawaban atau penyelesaiannya, untuk mencapai tujuan penegakan hukum dan kesejahteraan masyarakat.

Upaya pemulihan berupa ganti rugi, dan pelayanan sering dianggap oleh pihak tertentu sudah memberikan kepuasan dan memberikan keadilan kepada korban kejahatan, padahal disatu sisi pemberian ganti rugi kadangkala dianggap tidak seimbang dengan penderitaan yang dialami oleh korban kejahatan.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, Upaya perlindungan terhadap korban kejahatan dapat dilihat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau lebih dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Permasalahan di dalam tulisan ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menjadi kendala/hambatan dalam pemberian ganti rugi dan upaya pemulihan kepada korban kejahatan.

PEMBAHASAN

Pengertian Korban Kejahatan

Pengertian dan ruang lingkup korban kejahatan menurut Resolusi Majelis Umum PBB No. 40/34 tahun 1985, adalah orang-orang baik secara individual maupun

kolektif, yang menderita kerugian akibat perbuatan atau tidak berbuat yang melanggar hukum pidana yang berlaku disuatu negara, termasuk peraturan yang menyalahgunakan kekuasaan.

Dalam bagian lain terutama mengenai pengertian "gugatan korban", orang-orang yang menjadi korban dari mereka yang melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana nasional, sudah dianggap melakukan pelanggaran terhadap norma HAM yang diakui secara internasional termasuk juga dalam definisi "korban".

Pengertian kerugian menurut Resolusi Majelis Umum PBB No. 40/34 Tahun 1985, meliputi kerugian fisik, maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi, atau kerusakan substansial dari hak-hak asasi para korban. Seseorang dapat dipertimbangkan sebagai korban tanpa melihat apakah sipelaku kejahatan itu sudah diketahui, ditahan, dituntut, atau dipidana. Istilah korban juga mencakup keluarga dekat/orang-orang yang menjadi tanggungan korban, dan orang-orang yang menderita kerugian karena berusaha mencegah terjadinya korban.

Jadi, pengertian korban dan luas cakupannya merupakan hasil dari konstruksi sosial, dengan demikian sangat tergantung dengan pemahaman orang/masyarakat itu sendiri. Karena perbuatan yang dikonstruksikan dalam Undang-Undang sebagai kejahatan secara jelas akan menunjukkan spesifikasi dari korbannya.

Perlindungan korban Kejahatan ditinjau dari Upaya Pemulihan dan Ganti rugi

1. Pemulihan

Ketika tindak pidana terjadi, pihak yang secara langsung mengalami penderitaan adalah korban, tindak pidana yang terjadi dapat menciptakan situasi dan kondisi yang menyulitkan bagi korban untuk warga masyarakat seperti sedia kala. Dalam mengatasi kesulitan korban membutuhkan pendampingan dan pelayanan untuk dapat keluar dari kesulitannya tersebut, perlunya pendampingan dan pelayanan korban adalah sebagai berikut :

- a. Karena sistem peradilan pidana telah memperlakukan korban secara tidak proporsional, bahkan cenderung mengeksploitisir.
- b. Karena tindakan pelaku telah menimbulkan

penderitaan pada korban

- c. Karena birokrasi penegakan hukum akan mendapatkan manfaat, yaitu tumbuhnya motivasi korban untuk bekerjasama dalam kerangka penaggulangan kejahatan
- d. Karena dengan adanya program pendampingan dan pelayanan korban akan terbantu keluar dari penderitaannya.
- e. Karena masyarakat, dengan stigmanya menepatkan korban dalam posisi yang semakin menambah penderitaan korban.

Dengan adanya program pendampingan dan pelayanan diatas, maka diharapkan kepada korban kejahatan dapat mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya, dimana proses pendampingan untuk berhadapan dengan aparat penegak hukum serta dengan mempertimbangkan kondisi psikologis korban, maka pendampingan sebaiknya dilakukan oleh pihak-pihak independen di luar birokrasi penegak hukum dan yang mempunyai pendekatan psikologis dengan korban.

Sedangkan **manfaat** yang didapat korban dari pendampingan dan pelayanan adalah:

- a. Membantu korban memulihkan Trauma psikis akibat tindak pidana
- b. Membantu korban dalam proses penyelesaian kasusnya.
- c. Korban takut atau malu untuk melaporkan atau mengadukan tindak pidana yang terjadi
- d. Korban tidak percaya pada kinerja aparat penegak hukum.
- e. Sebagai imbalan terhadap sistem peradilan pidana yang terfokus pada pelaku

Adanya manfaat program pemulihan berupa pendampingan dan pelayanan dapat menumbuhkan kepercayaan kepada korban, bahwa kebutuhannya untuk keluar dari penderitaan juga diperhatikan. J.Duisch, mengatakan bahwa: "Fungsi utama program pemulihan dapat dibagi secara primer dan sekunder, dan tersier. Yang primer adalah yang bersifat segera dan diperlukan, dan ditujukan memberikan pelayanan langsung secara segera kepada para klien. Yang sekunder, adalah kurang penting, lebih banyak berkaitan dengan perhatian jangka panjang dan luas lingkupnya lebih lebar. Fungsi yang tersier biasanya adalah unik untuk kategori korban yang khusus, yang dapat mungkin mempunyai tujuan jangka

pendek dan panjang, dan lebih banyak relevan untuk para perancang, pendidik, dan masyarakat pada umumnya, dari pada untuk para korban dan badan-badan sistem peradilan kriminil".

2. Ganti Rugi

Sebagai pihak yang menderita kerugian, korban sering dilupakan dalam sistem peradilan pidana. Sikap kurang pedulinya sistem peradilan pidana terhadap kerugian yang diderita oleh korban tersebut berpangkal pada peraturan perundangan yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan peradilan. Pengaturan ganti kerugian dalam peraturan perundang-undangan dalam karakteristik ganti kerugian pada korban kejahatan.

a. KUHP

Dalam hal ini diatur menjatuhkan pidana bersyarat, menurut Pasal 14 c KUHP, hakim dapat menetapkan syarat khusus bagi terpidana untuk mengganti kerugian baik semua atau sebagian yang timbul akibat dari tindak pidana yang dilakukannya.

b. KUHP

KUHAP mengatur tiga hak hukum yang dapat digunakan oleh korban kejahatan dalam proses peradilan pidana. *Pertama*, hak untuk melakukan kontrol terhadap penyidik dan penuntut umum yaitu hak untuk mengajukan keberatan terhadap tindakan penghentian penyidikan dan/atau penghentian penuntutan dalam kapasitasnya sebagai pihak ketiga yang berkepentingan (Pasal 77 jo Pasal 80 KUHP). *Kedua*, hak korban kejahatan yang berkaitan dengan kedudukannya sebagai saksi, yaitu hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi (Pasal 168 KUHP), dan hak bagi keluarga korban, dalam hal korban meninggal dunia, untuk mengizinkan/tidak mengizinkan polisi melakukan otopsi (Pasal 134-136 KUHP). *Ketiga*, hak untuk menuntut ganti kerugian terhadap kerugian yang diderita akibat kejahatan (Pasal 98-101 KUHP).

Penahanan KUHAP terhadap korban suatu tindak pidana adalah berupa mempercepat proses untuk memperbaiki ganti kerugian yang diderita oleh korban kejahatan sebagai akibat perbuatan sipelaku, dengan cara menggabungkan perkara pidananya dengan perkara gugatan ganti kerugian yang pada hakikatnya merupakan perkara perdata.

Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

- 1). Ganti kerugian adalah ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHP.
- 2). Yang berhak adalah orang atau ahli warisnya yang oleh Praperadilan / Pengadilan negeri dikabulkan permohonannya untuk memperoleh ganti kerugian.
- 3). Penetapan Pengadilan adalah putusan pemberian ganti kerugian oleh Praperadilan / pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 96 KUHP.

C. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Diatur tentang Ganti Rugi dan Rehabilitasi yang lebih jelas dalam PP No.3 Tahun 2002, yakni hak khusus yang diberikan kepada korban pelanggaran HAM berat dimana ganti kerugian yang diberikan oleh negara kepada pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawab sepenuhnya baik itu kepada korban/keluarganya/pihak ke-3, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau kerugian, sedangkan Rehabilitasi adalah pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan atau hak-hak lainnya.

Pengertian Restitusi dan Kompensasi

Restitusi dan kompensasi merupakan istilah yang dalam penggunaannya sering dipertukarkan. Namun menurut Stephen Schafer, perbedaan antara kedua istilah sebagai berikut :

1. Kompensasi bersifat keperdataan. Kompensasi timbul dari permintaan korban dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat/negara.. Dasar kompensasi dari negara adalah fundamental bahwa setiap negara seharusnya memiliki bentuk jaminan terhadap resiko kejahatan, sebagai bentuk solidaritas sosial. Kompensasi diberikan karena seseorang menderita kerugian materiil dan immaterial.
2. Restitusi bersifat pidana. Timbul dari putusan pengadilan pidana. dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban pidana. Terdapat lima sistem dalam pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada korban kejahatan, yakni :

1. **Ganti rugi** yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses perdata. Sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana.

2. **Kompensasi** yang bersifat keperdataan diberikan melalui proses pidana

3. **Restitusi** yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana diberikan melalui proses pidana. Walaupun restitusi disini tetap bersifat keperdataan, tidak diragukan sifat pidananya. Salah satu bentuk restitusi menurut sistem ini adalah "denda kompensasi". Denda ini merupakan "kewajiban yang bernilai uang" yang dikenakan kepada terpidana sebagai suatu bentuk pemberian ganti rugi kepada korban di samping pidana yang seharusnya diberikan.

4. **Kompensasi** yang bersifat perdata, diberikan melalui pidana dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara. Disini kompensasi tidak mempunyai aspek pidana apapun, walaupun diberikan dalam proses pidana. Jadi, kompensasi tetap merupakan lembaga keperdataan murni, tetapi negaralah yang memenuhi atau menanggung kewajiban ganti rugi yang dibebankan pengadilan kepada pelaku. Hal ini merupakan pengakuan bahwa negara telah gagal menjalankan tugasnya melindungi korban dan gagal mencegah terjadinya kejahatan.

5. **Kompensasi** yang bersifat netral, diberikan melalui prosedur khusus. Sistem ini diterapkan dalam hal korban memerlukan ganti rugi, sedangkan sipelaku dalam keadaan bangkrut dan tidak dapat memenuhi tuntutan ganti rugi kepada korban. Pengadilan Perdata atau pidana tidak berkompeten untuk memeriksa, tetapi prosedur khusus/tersendiri dan independen yang menuntut campur tangan negara atas permintaan korban.

Sampai sekarang di Indonesia belum ada suatu lembaga yang secara khusus menangani masalah pemberian kompensasi terhadap korban kejahatan, seperti yang dilakukan di beberapa negara maju. Sebagai contoh, di Amerika Serikat ada suatu lembaga yang bernama pemberian keadilan bagi korban kejahatan. Lembaga ini dibentuk untuk menangani pemberian bantuan finansial kepada korban kejahatan berupa penggantian biaya pengobatan, pemakaman, kehilangan penghasilan dan sebagainya.

Adanya lembaga semacam pemberian keadilan

bagi korban kejahatan sangat diperlukan, karena lembaga ini dapat membantu korban kejahatan yang menderita kerugian secara finansial, khususnya apabila pelaku kejahatan tidak mampu membayar ganti kerugian kepada korban sebagai akibat suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Hal yang memerlukan perhatian penting dalam pelaksanaan pembayaran ganti kerugian kepada korban adalah perlunya diupayakan agar sistem pemberian ganti kerugian dilaksanakan dengan sederhana dan singkat sehingga apa yang menjadi hak korban dapat segera direalisasikan.

Kendala yang dihadapi dalam pemberian upaya pemulihan dan ganti rugi

Pelaksanaan program pelayanan itu sendiri tidak lepas dari kendala. Menurut Arief Gosita, pelaksanaan program pelayanan terhadap korban tersebut paling tidak menghadapi persoalan :

1. Konseptualisasi
2. Penawaran dan sosialisasi konsep pemikiran yang baru
3. Sumber daya dan dana
4. Institusionalisasi

Kendala/persoalan yang perlu diperhatikan penegak hukum dalam pengaturan ganti kerugian yakni:

- a. Tindak pidana apakah yang layak diancam dengan sanksi ganti kerugian
- b. Siapakah yang wajib memberikan ganti kerugian pada korban
- c. Kerugian atau penderitaan apakah yang dapat diganti dan berapakah jumlah ganti kerugiannya, secara terperinci hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan besarnya jumlah ganti kerugian adalah:
 1. Jenis dan kualifikasi tindak pidana
 2. Peran serta korban dalam tindak pidana
 3. Derajat penderitaan korban
 4. Kemampuan ekonomis pemberi ganti kerugian
- d. Kepada siapakah ganti kerugian diberikan
- e. Bagaimana ganti kerugian harus ditarik dari dan dibayarkan oleh pemberi ganti kerugian

Apabila ganti kerugian akan ditarik dari dan dibayarkan oleh pelaku, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) **Kapan pelaku harus membayarkan ganti kerugian**

WAWASAN

tersebut.; Hal ini berkaitan dengan alternatif pilihan kapan pelaku diwajibkan memberikan ganti kerugian, apakah sebelum proses peradilan dilakukan atau pada saat sudah selesai, masing-masing pilihan ada keuntungan dan kerugian.

2) **Batas waktu pembayarannya;** Penentuan batas waktu ini sangat penting untuk menjaga tidak berlakut-lakutnya ganti kerugian kepada korban. Ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan dalam penentuan batas waktu pembayaran ganti kerugian, yaitu: (a) Akibat tindak pidana bagi korban, baik korban langsung atau tidak langsung, (b) Kemampuan korban atau keluarga korban untuk melakukan tindakan pemulihan, (c) Kondisi keuangan pelaku.

3) **Prosedur atau cara bagaimana pelaksanaan pembayaran ganti kerugian oleh pelaku**

4) **Kemampuan ekonomis pelaku untuk membayar**

Di dalam KUHP, pemberian ganti kerugian mempunyai karakteristik yang berbeda dengan sanksi lainnya, dan didasarkan pada Pasal 14 c yang pada prakteknya pidana bersyarat tidak banyak dipilih oleh hakim karena adanya hambatan-hambatan tertentu, yaitu: (a) Adanya pengawasan dalam sistem pengawasan dan pembinaan, (b) Adanya hambatan dalam perundang-undangan, (c) Adanya hambatan dalam bidang teknis dan administrasi (d) Adanya hambatan dalam bidang sarana dan pra sarana (e) Adanya hambatan dalam proses penjatuan pidana.

Dari ketentuan di atas pejabat berwenang dapat menetapkan adanya syarat khusus apapun yang harus dipenuhi dalam masa percobaan, satu-satunya batasan tidak mengurangi kemerdekaan agama dan kemerdekaan politik terpidana. Sehingga dalam masa percobaan terpidana diwajibkan untuk memberikan ganti kerugian pada korbannya.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Faktor yang menyebabkan pemberian ganti rugi belum memenuhi rasa keadilan bagi korban kejahatan akan hak-haknya sebagai pihak yang dirugikan karena adanya faktor kendala/hambatan yakni: Undang-undang, fasilitas pendukung, dan kesadaran pendukung.
2. Pengaturan upaya pemulihan dan ganti rugi bagi

korban kejahatan diatur dalam pasal 98-101 KUHP. (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) mengenai penggabungan ganti rugi, KUHP, dan UU NO. 26 Tahun 2000 tentang korban kejahatan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Saran-saran

1. Upaya pemulihan dan ganti rugi pada korban kejahatan harus menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat luas, dikarenakan korban kejahatan merupakan pihak yang paling dirugikan, sehingga berhak untuk mendapatkan hak-haknya akan kepastian hukum.
2. Diindonesia perlu dibentuk suatu lembaga khusus yang bertugas dan menangani dalam hal pemberian pemulihan dan ganti rugi bagi korban kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, C.V Akademika Pressindo, Jakarta, 1983.
- Didik M. Arief Mansyur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007
- G.Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995
- Roeslan Saleh, *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-asas Hukum Nasional*, Karya Dunia Pikir, Jakarta, 1996
- Saparinah Sadli, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, Bulan Bintang, Jakarta, 1976

www.google.com

**HINDARI TINDAK PIDANA
AGAR TIDAK MERUGIKAN
ORANG LAIN
DAN
DIRI SENDIRI**